



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.15, No.2, Desember 2018

KONSTELASI POLITIK DI TAHUN ELEKTORAL

- Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018
- Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal
- Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017
- Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)
- Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019
- Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi
- Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia
- *Marketing* Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018

RESUME PENELITIAN

- Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung
- Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 2	Hlm. 129-320	Jakarta, Desember 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018 Moch. Nurhasim	129–142
• Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal Lili Romli	143–160
• Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017 Agus Sutisna dan Idil Akbar	161–178
• Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018) Firman Noor	179–196
• Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019 Ridho Imawan Hanafi	197–213
• Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi Sri Budi Eko Wardani	215–231
• Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia Sri Yanuarti	233–248
• Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018 M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri	249–265
Resume Penelitian	
• Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung Kurniawati Hastuti Dewi, dkk	267–288
• Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Aisah Putri Budiatri, dkk	289–306
Review Buku	
• Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik Mouliza K.D Sweinstani	307–317
Tentang Penulis	319–320
Pedoman Penulisan	321–325

CATATAN REDAKSI

Konstelasi politik menjelang tahun elektoral menjadikan dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal menarik untuk dikaji.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 8 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama berjudul “Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018” yang ditulis oleh Moch. Nurhasim. Artikel ini membahas tentang Pilkada serentak 2018 yang menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya dan bahkan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Artikel kedua ditulis oleh Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, memperlihatkan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan “mahar politik” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Agus Sutisna dan Idil Akbar berjudul “Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017” membahas mengenai kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.

Artikel keempat yakni “Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018” ditulis oleh Firman Noor. Artikel ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarkan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019” yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi. Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih.

Sementara itu, artikel “Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi” yang ditulis oleh Sri Budi Eko Wardani yang membahas mengenai Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.

Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti berjudul “Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia” membahas mengenai keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim kemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka

dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.

Artikel terakhir yakni ditulis oleh Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri berjudul “Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018” membahas mengenai isu agama yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017. Naskah pertama ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi, “Modal, Strategi Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung”. Tulisan ini menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.

Naskah kedua, “Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi”, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Tulisan ini membahas mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi yang telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi

penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Danny Hayes & Jennifer L. Lawless, “Mitos Dan Realita Perempuan Dalam Pemilu: Pelajaran Dari Situasi Politik Amerika Di Era Polarisasi Politik”. *Review* yang ditulis Mouliza K.D Sweinstani menelaah respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca

sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu politik di tahun elektoral. Selamat membaca.

Redaksi

**DAMPAK ELEKTORAL KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA
TERHADAP PREFERENSI POLITIK WARGA BANTEN
PADA PILGUB 2017**

***THE ELECTORAL IMPACT OF BLASPHEMY ALLEGATION ON
BANTEN POLITICAL PREFERENCE IN 2017
GUBERNATORIAL ELECTION***

Agus Sutisna

FISIP Universitas Muhamamdiyah Tangerang
Email: tisna_1965@ymail.com

Idil Akbar

FISIP Universitas Padjadjaran Bandung
Email: idil.akbar@gmail.com

Diterima: 5 September 2018; Direvisi: 25 September 2018; Disetujui: 30 Desember 2018

Abstract

The study is conducted to illustrate the socio-political influence of the blasphemy case upon the dynamics of political preference of Banten citizens who are acknowledged as highly religious and mostly santri (students of religion). The paper incorporates qualitative approach, applying combinative data collection methods, such as interview, phenomenological analysis against the facts flowing around in public arena and the analysis of news articles in mass media. The result shows that blasphemy case done by Ahok as a candidate of DKI Jakarta Governor affects Banten Gubernatorial Election in 2017. It happened in the form of political preference shift in Banten. Rano-Embay who were proposed by the coalition of PDIP; Nasdem; and PPP, who were initially gained wide support from the society as they were assumed to represent the spirit to end the corrupt political dynasty of Ratu Atut Chosiyah's family, had a perpetual support degradation as the negative news about the blasphemy case by Ahok widened and sharpened continuously until the pre-election silence.

Keywords: *electoral impact, blasphemy, Banten gubernatorial election, political preference*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran bagaimana pengaruh sosio-politik kasus penistaan agama terhadap dinamika preferensi politik warga Banten yang dikenal sangat religius dan mayoritas kaum santri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan penerapan secara kombinatif metode pengumpulan data berupa wawancara, telaah fenomenologis terhadap fakta-fakta yang berkembang di arena publik serta kajian terhadap sumber-sumber informasi/pemberitaan di media massa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat

karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.

Kata Kunci: dampak elektoral, penistaan agama, pemilihan Gubernur Banten, preferensi politik

Pendahuluan

Tahun 2017, tepatnya tanggal 15 Februari 2017, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua digelar secara nasional. Terdapat 101 daerah yang melaksanakan pilkada; terdiri dari 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten¹. Dua dari 7 provinsi itu adalah Banten dan DKI Jakarta, yang secara geografis bertetangga, namun secara kultur dan politik relatif berbeda cukup jauh.

Banten dikenal sebagai daerah agamis dengan mayoritas penduduk pemeluk agama Islam sebesar 92.85%. Sisanya secara berturut-turut: Budha 3.21%, Kristen 1.94%, Katolik 1.22%, Hindu 0.78%, dan Kong Hu Cu 0.01%². Budaya paternalistik dan penghormatan terhadap simbol-simbol keislaman relatif sangat kuat. Bahkan dalam pandangan van Bruinessen dikemukakan, bahwa umat Islam di Banten lebih taat dalam menjalankan ajaran agamanya dibandingkan umat Islam lain di Jawa sebagaimana diungkapkannya dalam tulisan berikut :

“The populations of Banten were more faithful than other Javanese in the observance of such religious obligations as the fast during Ramadhan and the payment of Zakat. Moreover, unlike elsewhere the payment of zakat in Banten served to strengthen independent ulama the Kiai or guru as against the official religious functionaries who usually administered (and enforced) zakat³.”

Sementara itu, lanskap dinamis kepolitikan Banten, baik pada level provinsi maupun

kabupaten dan kota, secara umum didominasi oleh aktor-aktor kuat lokal (*local strongmen*) yang berhasil “memanfaatkan” arus demokratisasi dan penerapan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah melalui perhelatan pilkada langsung, baik dengan cara mempromosikan diri atau anggota keluarganya pada kontestasi-kontestasi pilkada, maupun dengan cara mengendors (sekaligus menunggangi) tokoh-tokoh lokal populer dan kompeten yang maju sebagai calon kepala daerah.

Jakarta juga termasuk daerah dengan penduduk mayoritas adalah pemeluk agama Islam, yakni sebesar 83,4%, dan berturut-turut pemeluk agama lainnya adalah Kristen 8,62%, Katolik 3,99%, Budha 3,75% dan lain-lain kurang dari 2%⁴. Meski mayoritas warganya beragama Islam, namun secara kultur sudah menjadi masyarakat yang relatif terbuka; budaya paternalistik relatif lemah; dan suasana multikulturalis yang merepresentasikan kawasan urban tumbuh subur. Kemudian secara politik, warga Jakarta relatif otonom dan mandiri. Tidak seperti di Banten, lanskap kepolitikan Jakarta juga relatif terbuka dan tidak ada dominasi dari kelompok-kelompok tertentu.

Dalam disertasinya yang mengkomparasi perbedaan Banten dan Jakarta dalam konteks penerapan desentralisasi dan dampak politiknya, Hamid (2015) menyimpulkan bahwa di Banten penerapan desentralisasi dan demokratisasi telah melahirkan gejala dinasti politik. Sementara dalam kurun waktu yang sama, desentralisasi dan demokratisasi di Jakarta melahirkan gejala populisme. Implikasi yang berbeda secara diametral ini dimungkinkan antara lain oleh karakteristik kultural dan sosio-politik yang berbeda antara Banten dan Jakarta sebagaimana

¹ Lihat: www.kpu.go.id.

² Lihat: BPS Provinsi Banten, www.banten.bps.go.id, 2015, hlm.132.

³ Von Bruinessen, Martin, “*Shari’a Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Sultanate of Banten*,” *Archipelago Journal*, (1995), hlm. 165-200.

⁴ Lihat: www.data.jakarta.go.id, 2016. Diakses pada 10 November 2018.

diuraikan di atas. Berlatar kondisi yang demikian itulah kedua provinsi ini menggelar perhelatan pilkada dalam waktu yang bersamaan (serentak), mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye terbatas dan terbuka, hingga ke hari pemungutan suara pada tanggal 15 Pebruari 2017 silam.

Kedua pilkada serentak 2017, Banten dan DKI Jakarta ini, menarik dicermati selain karena daya tarik (*attractiveness*) peta dinamis kepolitikan menjelang pilkada masing-masing dari kedua daerah ini; pun karena secara sosio-politik keduanya memiliki hubungan kalkulatif yang dapat saling mempengaruhi. Tentu saja dalam konteks studi ini, hubungan kalkulatif itu memposisikan pilkada Banten berada dalam situasi dipengaruhi oleh dinamika yang berlangsung pada pilkada DKI Jakarta.

Paling tidak ada dua argumentasi yang dapat menjelaskan isu hubungan kalkulatif itu. *Pertama*, posisi geopolitik DKI Jakarta dan Banten yang bersinggungan. Dalam posisi seperti ini interaksi dan pertukaran informasi dan komunikasi politik secara langsung antar warga (konstituen) di kedua provinsi berlangsung lebih intens. Suatu persentuhan yang dapat mempengaruhi pandangan dan sikap pemilih terhadap figur-figur calon kepala daerah, serta preferensi orang Banten dalam pemilukada di daerahnya. *Kedua*, posisi kandidasi Basuki Tjahya Purnama (Ahok) dalam Pilgub DKI Jakarta yang setara dengan posisi kandidasi Rano Karno dalam Pilgub Banten. Setara dalam pengertian bahwa keduanya dicalonkan oleh PDIP sebagai pengusung utama dalam partai-partai koalisi mereka. Posisi ini, meski mungkin tidak pada semua lapis dan segmen pemilih, sedikit-banyak akan menularkan pengetahuan, kesadaran dan tindakan kolektif (*collective political literacy*) pemilih di Banten serta mempengaruhi preferensi mereka berdasarkan “penyandingan atau penyeteraan” kandidasi Rano dengan Ahok⁵.

Sementara itu daya tarik kepolitikan menjelang pilkada di kedua daerah terkait dengan beberapa fakta berikut ini. *Pertama*, di

⁵ Agus Sutisna, *Memilih Gubernur, Bukan Bandit; Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawara*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), hlm. 130.

Banten dominasi keluarga Ratu Atut Chosiyah sedang mengalami kemerosotan menyusul dipenjarakannya sang gubernur dan adiknya Tubagus Chaeri Wardana karena kasus suap Pilkada Lebak 2013. Pada saat yang sama, Rano yang menggantikan Ratu Atut Chosiyah bukanlah sosok petahana yang kuat⁶, terutama jika dibandingkan dengan Ahok yang sama-sama meneruskan sisa waktu kepemimpinan gubernurnya. Situasi ini membuka peluang persaingan proses kandidasi pilkada menjadi lebih setara dan kompetitif diantara tokoh-tokoh yang berminat dan/atau didorong oleh masyarakat untuk maju. Mengorbitnya tokoh-tokoh Banten, baik lokal seperti Mulyadi Jayabaya (mantan Bupati Lebak), Wahidin Halim (mantan Walikota Tangerang), A. Taufik Nuriman (mantan Bupati Serang) dan Khaerul Jaman (Walikota Serang) misalnya, maupun tokoh-tokoh kaliber nasional seperti Anton Apriyantono (mantan Menteri Pertanian) dan Taufiequrrahman Ruki (mantan Ketua KPK) pada tahapan-tahapan pra-kandidasi tampaknya terdorong oleh situasi ini.

Kedua, masih menyangkut situasi politik di Banten. Pasca guncangan terhadap dinasti Ratu Atut Chosiyah sebagai dampak kasus Pilkada Lebak 2013 dan kemudian disusul pula oleh kasus dugaan korupsi alat kesehatan di Tangerang Selatan yang juga melibatkan Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Chaeri Wardana, semangat perubahan atau “move on” (meminjam istilah kalangan aktifis muda di Banten) untuk menyudahi dominasi politik kekerabatan keluarga Ratu Atut meningkat, terutama pada kalangan masyarakat sipil.⁷ Semangat ini yang kemudian direspon terutama oleh Rano sebagai calon tunggal PDIP dengan antara lain menolak dipasangkan dengan Khaerul Jaman (Walikota

⁶ Wawancara dengan AN, Dosen FISIP Universitas Mathalul Anwar Pandeglang, 27 September 2016 di Serang dan wawancara dengan BP, Dosen Universitas Tirtayasa Serang, 12 Oktober 2016 di Serang.

⁷ Beberapa komunitas masyarakat sipil yang sangat vokal menyuarakan penolakan terhadap dinasti antara lain : *Rumah Dunia* yang dipimpin oleh sastrawan Gola Gong, *Gerakan Masyarakat (Gemas) Tolak Dinasti* yang dimotori oleh Khoerul Umam Kf, *Madrasah Anti Korupsi (MAK)* Universitas Muhammadiyah Tangerang yang dikepalai Gufron Khan, dan *Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp)* yang diketuai Uday Suhada.

Serang, adik tiri Ratu Atut)⁸; dan lebih memilih Embay Mulya Syarif, tokoh masyarakat yang dikenal bersih dan memiliki integritas.

Ketiga, berbeda dengan di Banten, di DKI Jakarta meski peluang ke arah kontestasi yang terbuka dan kompetitif juga tersedia, tetapi posisi Ahok sebagai petahana relatif sangat kuat. Fakta ini paling tidak ditunjukkan oleh hasil-hasil survei yang selalu memosisikan Ahok pada urutan pertama baik popularitas maupun elektabilitas⁹ *Keempat*, pilkada DKI, jauh sebelum terjadi peristiwa Pulau Seribu pun sudah menarik perhatian dan memiliki daya magnet luar biasa selain karena merupakan barometer kepolitikan nasional, terutama juga karena dipercaya banyak orang dapat menjadi “batu loncatan” untuk meraih kekuasaan di tingkat nasional sebagaimana sudah dibuktikan oleh Joko Widodo, Presiden RI yang sebelumnya merupakan Gubernur DKI Jakarta.

Akan tetapi, di atas kedua fakta itu, pilkada Banten dan DKI menjadi lebih berdaya-tarik lagi ketika muncul kasus dugaan penistaan agama (*blasphemy*) yang dilakukan oleh Ahok melalui pidatonya di Pulau Seribu pada tanggal 27 September 2016. Meski tidak serta-merta, secara hipotesis kasus ini perlahan kemudian memicu terbentuknya hubungan elektoral berupa pengaruh terhadap preferensi politik warga Banten dalam pilkada di daerahnya. Secara lebih spesifik hubungan elektoral itu tidak lain adalah berupa pengaruh negatif terhadap posisi popularitas dan elektabilitas Rano Karno. Hal ini dimungkinkan paling tidak oleh karena tiga alasan. *Pertama*, kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang diekspose secara masif oleh media massa sejak peristiwanya terjadi itu membuat sebagian besar warga Banten terpicu sentimen keagamaannya dan kemudian terlibat dalam arus besar kemarahan umat Islam. *Kedua*,

warga Banten memahami (suatu pemahaman yang tidak sepenuhnya tepat sebetulnya) bahwa Ahok adalah kolega politik Rano, sama-sama petahana yang dicalonkan kembali oleh koalisi partai politik yang juga sama-sama dimotori oleh PDIP. *Ketiga*, bersitemali dengan kasus dugaan penistaan agama itu, dua isu sensitif bagi warga Banten juga mengemuka di orbit perbincangan dan kontestasi pilkada, yakni isu kebangkitan PKI dan paham komunismenya serta dominasi etnis Tionghoa. Dua isu yang dalam pemahaman umum sebagian warga Banten dipercaya terkait dengan PDIP dan Ahok. Berlatar paparan di atas, fokus kajian ini adalah mengeksplorasi dan mendiskusikan bagaimana dampak elektoral kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, gubernur petahana DKI Jakarta terhadap preferensi warga Banten yang dikenal religius dalam Pilgub 2017 yang dilaksanakan secara bersamaan dengan Pilkada DKI Jakarta dalam kerangka agenda nasional Pilkada serentak gelombang kedua tahun 2017.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data dieksplorasi dan dihimpun (*data collection*) dengan berbagai teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, tetapi disesuaikan penggunaannya dengan jenis dan ruang lingkup data yang dibutuhkan. Untuk berbagai data sekunder seperti literatur-literatur kajian sejenis dan rujukan-rujukan yang bernilai akademik (buku, jurnal dan laporan-laporan karya ilmiah seperti tesis dan disertasi), dokumen-dokumen berbagai peraturan perundangan yang relevan, serta sumber-sumber tertulis lainnya seperti berita dan artikel opini di media massa, dan lain-lain dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen. Sedangkan untuk berbagai data primer digunakan teknik wawancara semi-terstruktur (*semistructure interview*); dan dilakukan dengan tatap muka langsung dengan narasumber penelitian. Wawancara dalam penelitian dilakukan dengan teknik *topic guides*, dimana wawancara akan lebih fokus pada topik, bukan pada pertanyaan.

Narasumber atau informan serta besaran jumlahnya dalam penelitian ini dipilih berdasarkan karakteristik yang lazim digunakan dalam pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki

⁸ Wawancara dengan AH, Dosen Untirta Serang, 28 September 2016 di Serang dan YJ, jurnalis senior harian lokal *Kabar Banten*, 2 Oktober 2016 di Banten.

⁹ Secara umum rilis dari beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa hingga Januari 2017, Ahok-Djarot masih unggul dibanding dua paslon kompetitornya, meski trendnya menurun jika dibandingkan dengan hasil survei pada rentang waktu pertengahan hingga akhir tahun 2016. Lihat: news.detik.com, 22 Januari 2017; tempo.co, 29 Januari 2017; news.detik.com, 9 Februari 2017.

keterlibatan mendalam dan luas dengan isu dinamika kepolitikan lokal (Banten); memahami konteks dan substansi pokok permasalahan yang diteliti; serta dapat diperkirakan mampu bersikap obyektif dalam memberikan pandangan dan penyikapan terhadap setiap aspek dari isu penelitian yang ditanyakan.

Pilkada: Siasat Kelembagaan Mengonsolidasikan Demokrasi di Daerah

Studi mengenai Pilkada langsung oleh para ahli kebanyakan didasarkan pada pendekatan kelembagaan baru (*new institutionalism*). Suatu mazhab pendekatan dalam analisis politik modern yang oleh Samuel Huntington disebut sebagai bersifat “empiris, deskriptif, institusional dan prosedural”¹⁰. Pendekatan ini berusaha menjelaskan sejarah, keberadaan dan fungsi-fungsi berbagai lembaga di daerah (lembaga pemerintahan, hukum, pasar dll) berdasarkan asumsi-asumsi dan teori ekonomi liberal¹¹. Dalam uraian Mochtar Pabottingi, istilah “kelembagaan” sebagaimana dimaksud Huntington dalam konteks ini merujuk pada keharusan berfungsinya enam lembaga minimal yang niscaya dalam demokrasi, yaitu: partai politik, pemilihan umum, parlemen, eksekutif, peradilan, dan pers yang bebas. Sedangkan istilah “prosedur” merujuk pada berjalannya proses demokrasi dengan penekanan pada pemilihan umum menurut hak-hak konstitusional tiap warga negara¹². Pendekatan ini menawarkan langkah-langkah pembaruan desain terhadap berbagai aspek kelembagaan politik sebagai strategi untuk mengkonsolidasikan demokrasi dan mengembangkannya.

¹⁰ Samuel Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991), hlm 6.

¹¹ Vedi R. Hadiz, *Decentralisation and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*, *Search Working Paper*, No.47, Hong Kong, 2003, hlm.1

¹² Syamsuddin Haris (ed), *Partai dan Parlemen Lokal : Era Transisi Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: LIPI, 2007), hlm. xi-xii.

Dua ilmuwan dari mazhab pendekatan kelembagaan, James March dan Johan Olsen¹³ mendalilkan, bahwa “*political democracy depends not only on economic and social conditions, but also on the design of political institutions*”. Bahwa demokrasi bergantung bukan hanya pada kondisi sosial dan ekonomi semata, melainkan juga pada desain kelembagaan politik. Perspektif kelembagaan baru ini meyakini bahwa desain kelembagaan yang dianut oleh suatu negara memiliki pengaruh terhadap wajah demokrasi yang dimiliki¹⁴. Melalui pendekatan ini, Marijan menggarisbawahi tiga aspek kelembagaan penting yang dapat mendorong berjalannya proses demokratisasi di daerah. Ketiga aspek itu adalah budaya politik yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi seperti *moderation, cooperation, bargaining*, dan *accommodation; civil society* yang kuat yang dapat mengontrol kekuasaan; dan lembaga perwakilan (DPRD) yang benar-benar menjalankan fungsi keterwakilan sekaligus dapat menciptakan mekanisme *check and balances* di daerah¹⁵.

Dalam kerangka demokratisasi berdasarkan pendekatan kelembagaan inilah, Pilkada secara langsung dianggap sama pentingnya dengan pemilu nasional, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dengan mengikuti pemikiran Tip O’Neill seperti dikutip Agustino¹⁶, “*all politics is local*”, Pilkada bahkan menjadi sangat penting sebagai instrumen kelembagaan dan jalan untuk memperkuat demokrasi di aras nasional. Demokrasi akan berkembang subur dan terbangun kuat di aras nasioanal apabila pada tingkatan yang lebih rendah (lokal) nilai-nilai demokrasi berakar kuat.

¹³ James March dan Johan P. Olsen, *Democratic Governance*, (New York: The Free Press, 1995).

¹⁴ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.1.

¹⁵ Larry Diamond, *Introduction : Political Culture and Democracy*, dalam *Political Culture and Democracy in Developing Contries*, (London : Lynne Reinner Publisher, 1994), hlm.10.

¹⁶ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.17-18.

Bahwa demokrasi di tingkat lokal merupakan prasyarat bagi terbangunnya demokrasi di tingkat nasional juga diyakini oleh Brian C. Smith¹⁷, yang mengajukan empat argumentasi untuk mendukung pandangannya, yaitu: (1) Demokrasi pemerintahan di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara didalam suatu masyarakat yang demokratis. Hal ini terutama karena tingkat proximity (kedekatan) antara pemerintah daerah dengan masyarakat, yakni lebih dekat; (2) Pemerintah daerah dipandang sebagai pengontrol perilaku pemerintah pusat yang berlebihan dan kecenderungan anti-demokrasi didalam suatu pemerintahan yang sentralistis. Kecenderungan seperti ini khususnya terjadi dalam masa transisi dari pemerintahan otoriter menuju pemerintahan demokratis. Di dalam masa transisi ini pemerintah daerah memiliki posisi tawar-menawar kekuasaan yang lebih tinggi atas kekuasaan dan otoritas dengan pemerintah pusat; (3) Demokrasi di daerah dianggap mampu menyuguhkan kualitas partisipasi yang lebih baik dibandingkan kalau terjadi di tingkat nasional. Fakta bahwa komunitas di daerah relatif terbatas dan masyarakatnya lebih mengenal diantara satu dengan lainnya dianggap sebagai dasar argumen bahwa partisipasi di daerah itu lebih bermakna dibandingkan dengan di tingkat nasional. Partisipasi di daerah lebih memungkinkan adanya deliberative democracy, yakni adanya komunikasi yang lebih langsung didalam berdemokrasi; (4) Kasus negara Kolumbia sebagai contoh kasus, menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah pusat akan mengalami penguatan manakala pemerintah pusat itu melakukan reformasi di tingkat lokal. Penguatan legitimasi ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan daerah kepada pemerintah pusat.

Pandangan yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Larry Diamond¹⁸, yang menyatakan bahwa peran pemerintah daerah termasuk DPRD di dalamnya sangat penting dalam mempercepat vitalitas demokrasi. Alasannya: (1) Pemerintah daerah dapat membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan berdemokrasi kepada warganya; (2) Pemerintah daerah dapat meningkatkan

akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada berbagai kelompok kepentingan yang ada di daerah; (3) Pemerintah daerah dapat menyediakan saluran dan akses bagi kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan; (4) Pemerintah daerah bisa mendorong terwujudnya check and balances dalam praktik kekuasaan; (5) Pemerintah daerah bisa memberikan kesempatan kepada partai-partai politik untuk melakukan oposisi terhadap kekuasaan di daerah, tentu melalui jaringan hierarkis kepartaian.

Namun demikian, sejak dihelat tahun 2005 silam, isu mengenai Pilkada juga banyak dikaji dan diperbincangkan dalam spektrum yang lain. Beberapa ahli mengkajinya dalam konteks pelaksanaan desentralisasi (khususnya *devolution of power*) sekaligus penguatan implementasi otonomi daerah¹⁹. Sebagian yang lain membahasnya dalam hubungannya dengan gejala kehadiran orang-orang kuat lokal (*local strongmen*) di panggung kekuasaan formal dan politik dinasti di daerah²⁰, dan tidak sedikit yang mengkaji Pilkada sebagai *entry point* sekaligus arena kebangkitan politik identitas, etno-sentrisme dan primordialisme seperti artikel yang ditulis oleh Taufiq Tanasaldy, “Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat” dan tulisan Franz dan Keebet von Benda-Beckmann, “Identitas-identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-komunitas Politik Minangkabau”²¹.

¹⁹ Dapat dilihat dalam Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik...*; Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014); dan Abdul Hamid, *Observation of Democratic Decentralization in Indonesia during 2009–2014: Political Dynasty in Banten Province and Populism in Jakarta Province*. (Kyoto: Graduate School of Global Studies, Doshisha University, 2016).

²⁰ Dapat disimal dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistyanto (eds.), *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, (Singapore : ISEAS, 2009); Wasisto Raharjo Djati, *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi : Dinasti Politik di Aras Lokal*, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, (Juli 2013) dan Agus Sutisna, “Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah,” *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 2, No.2, (Juli 2017).

²¹ Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

¹⁷ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia...*, hlm.170-171.

¹⁸ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia...*, hlm.170-171.

Pilkada, Politik Identitas, dan Sektarianisme Politik

Dalam konteks demokrasi di Indonesia, pilkada bisa dikatakan belum menemukan bentuk yang ideal dan memenuhi ekspektasi rakyat. Di setiap perhelatannya berbagai eksponen acapkali berkelindan dan terus mereproduksi kepentingan. Harapan awal bahwa pilkada diniatkan untuk menjadi arena partisipasi masyarakat, tetapi di banyak situasi pilkada justru menjadi arena konflik. Kegusaran paling krusial yang mengemuka dalam pilkada menyentuh dua hal utama. *Pertama*, apakah pilkada memberi peluang nyata bagi intensitas partisipasi masyarakat, yang dalam fungsinya berperan memperluas kesadaran rakyat akan hak-hak konstitusionalnya? *Kedua*, apakah pilkada dimaksudkan untuk menjadi ruang dialog antar kepentingan, dan lebih dari itu menjadi bagian dari proses pelembagaan demokrasi elektoral?

Belakangan ini, rakyat disuguhkan dengan realitas politik yang tak lagi berbicara soal perebutan pengaruh dan perubahan perilaku memilih masyarakat. Tetapi yang saat ini muncul adalah hadirnya perebutan kekuasaan yang mengedepankan friksi-friksi kebangsaan. Pilkada Indonesia diwarnai dengan menguatnya politik identitas yang mempolarisasi publik dalam kutub-kutub yang saling bertentangan. Arus puncak dari dinamika politik identitas ini hadir dan sangat kuat dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Posisi Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta menorehkan problematika kebangsaan yang cukup fundamental yakni kemunculan yang kentara akan sektarianisme politik di pilkada.

Kemunculan politik identitas di pilkada DKI merupakan bagian dari proses menstimulasi keadaan, dimana di satu sisi terdapat segolongan masyarakat yang merasa diberlakukan berbeda dari segolongan masyarakat lainnya yang lebih dominan. Setidaknya dalam perspektif politik identitas di pilkada DKI seperti itu yang terjadi. Kauffman menyebutkan bahwa politik identitas bermula dari adanya kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa tersingkir oleh dominasi kelompok lainnya di dalam sebuah bangsa atau negara²².

²² Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), hlm.4.

Contoh yang terjadi di Amerika Serikat, di mana praktik pembedaan kelompok masyarakat telah membangun kesadaran golongan yang merasa terpinggirkan seperti masyarakat kulit hitam, dan etnis-etnis lainnya melawan golongan masyarakat kulit putih.

Dengan demikian, politik identitas didefinisikan sebagai politik yang digunakan dalam membedakan. Politik identitas menjadi sebuah penegasan terhadap batas untuk menentukan siapa yang disertakan dan siapa yang ditolak. Hal ini membuat status keanggotaan antara seorang anggota dan orang lain yang bukan anggota menjadi jelas dan bersifat permanen. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agnes Heller²³ yang menilai bahwa politik identitas adalah strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan sebagai kategori utamanya.

Politik identitas sangat berkaitan erat dengan identitas etnis dan identitas agama. Identitas menurut Castells di dalam buku keduanya yang berjudul *The Power of Identity*²⁴ bermakna: 1) sumber makna dan pengalaman orang; 2) proses konstruksi makna yang berdasar pada atribut kultural, atau seperangkat atribut kultural, yang diprioritaskan diatas sumber-sumber pemaknaan lain; 3) sebuah identitas yang bersifat jamak (*plural*) dan bukan tunggal (*singular*); 4) sebuah identitas yang berfungsi untuk menata dan mengelola makna (*meanings*); 5) gugus identitas yakni sumber-sumber makna bagi dan oleh aktor yang dikonstruksi dengan proses individuasi; 6) sebuah identitas terkait dengan proses internalisasi nilai, norma, tujuan dan ideal; 7) sebuah identitas yang pada hakikatnya dibedakan menjadi identitas individu dan identitas kolektif. Individualisme dapat menjadi identitas kolektif sebagai identitas bersama dalam suatu kesamaan identitas individu yang dikumpulkan menjadi kesatuan identitas.

Politik identitas lazimnya akan memunculkan sektarianisme politik. Pada dasarnya, sektarianisme politik, seperti dalam

²³ Ubed Abdillah, *Politik Identitas Etnis, Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, (Magelang: IndonesiaTera, 2002), hlm.22.

²⁴ Manuel Castells, *The Power of Identity, Second Edition with a New Preface*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), hlm.6.

pilkada DKI Jakarta, muncul bukan hanya faktor fragmentasi perbedaan ideologi yang menghasilkan perdebatan dan persetujuan. Sektarianisme politik muncul lebih karena lemahnya perdebatan programatik yang lebih fundamental yang seharusnya dihadirkan dalam perhelatan. Maka, yang kemudian mengemuka dan menguat adalah sikap fanatisme berlebihan. Alhasil, pilkada telah menyeret kalangan pro demokrasi pada perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan melihat persoalan. Mereka terbelah dalam mendudukkan persoalan identitas dan keadilan sosial. Apakah memenangkan Ahok dengan dalih demi membela keragaman dan melawan sektarianisme atau menolak Ahok dengan dalih demi perjuangan keadilan sosial, atau posisi ketiga, tidak mendukung keduanya yang berarti golput, karena keduanya dianggap tidak merepresentasikan kepentingan politik rakyat²⁵.

Jika ditelisik, maka apa yang menyebabkan menguatnya politik identitas dan sektarianisme politik di pilkada DKI? Pragmatisme politik dan marginalisasi kelompok masyarakat lokallah yang telah mendorong menguatnya politik identitas. Simbol identitas (etnik dan agama) sering menjadi alat mobilisasi paling menonjol dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini nampak misalnya dalam riset Fox dan Menchik yang menunjukkan bahwa sebagian besar (65 persen) poster kampanye dalam Pilkada mengandung muatan yang menekankan pada dimensi identitas para kandidat dalam Pilkada²⁶.

Meski demikian, penelitian Fox dan Menchik mengatakan bahwa penggunaan simbol identitas dalam Pilkada tentu tidak serta-merta berbahaya. Penelitian Fox dan Menchik menunjukkan sebagian dari poster-poster dalam kampanye yang menonjolkan simbolisme identitas mempunyai karakter inklusif, misalnya dengan menampilkan secara bersamaan simbol-simbol yang merepresentasikan keragaman identitas di

daerah²⁷. Namun dalam konteks yang berbeda, tidak jarang mobilisasi elektoral dilakukan dengan mengafirmasi kontestasi antarkelompok identitas.

Pilkada di DKI Jakarta memberi ilustrasi bagaimana momen politik ini telah menjadi arena bagi mobilisasi politik berdasarkan sentimen identitas etnik dan agama untuk mengkonfirmasi calon tertentu yang berbeda dari mayoritas. Ini bukan berarti terjadi pembelahan pola pemilih secara total berdasarkan afiliasi agama. Ada keragaman etnik dan agama di kelompok pendukung masing-masing pasangan; tetapi secara umum nampak terjadi konsentrasi dukungan dari kelompok-kelompok garis keras terhadap pasangan tertentu dengan menggunakan sentimen SARA²⁸.

Pengaruh politik identitas dan sektarianisme politik inilah yang diprediksi akan menjadi pengaruh besar di dalam perpolitikan secara nasional atau pada level nasional. Meski, banyak ahli politik mengatakan bahwa faktor etnisitas tidak lagi cukup berpengaruh dalam kontestasi politik pada level nasional. Para ahli seperti Mallarangeng (1997), William Liddle & Saiful Mudjani (2007) menyatakan bahwa faktor etnis dan agama tidak lagi merupakan isu utama yang berpengaruh dalam kontestasi politik nasional. Tetapi dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ananta *et.al* (2004) sebaliknya, bahwa faktor etnisitas masih merupakan jualan yang laku dalam politik Indonesia. Alasan utama yang diajukan adalah karena para pemilih di Indonesia sangat sedikit yang memilih berdasarkan pertimbangan rasional.

Fakta lain juga diungkapkan dalam penelitian Arfan Nusi²⁹ yang menyatakan bahwa sejauh ini, kenyataan politik di Indonesia pasca reformasi masih didominasi oleh sektarianisme yang menihilkan perspektif kelas dalam gerak dan wacananya. Artikulasi Islam politik di Indonesia dewasa ini masih belum banyak menyentuh

²⁵ Roy Murtadho, "Politik Sektarianisme: Benarkah Jakarta Telah Jatuh ke Tangan Kaum Intoleran," 28 April 2017, <https://indoprogress.com/2017/04/politik-sektarianisme-benarkah-jakarta-telah-jatuh-ke-tangan-kaum-intoleran/>, diakses pada 20 September 2018.

²⁶ Colm Fox dan Jeremy Menchik, *The Politics of Identity in Indonesia: Results from Campaign Advertisements*, (APSA 2011 Annual Meeting Paper, 2011)

²⁷ Colm Fox dan Jeremy Menchik, *The Politics of...*

²⁸ A.E. Priyono, "Anti Kafir Politics in Local Election: Jakarta and Medan Case," <http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/18/anti-kafir-politics-local-electin-jakarta-and-medan-case.html>, diakses pada 5 September 2018.

²⁹ Arfan Nusi, "Pemikiran Islam dalam Bingkai Pergolakan Politik Sektarian," *Jurnal Yaqzhan* Vol.2, No.2, (2016):173-188.

persoalan yang menyangkut kehidupan dan penderitaan umat sehari-hari. Sebagai ilustrasi, politik di Indonesia belum banyak tampil di depan dalam berbagai permasalahan umat seperti perampasan tanah, penggusuran, penolakan terhadap reklamasi pantai, perjuangan upah layak, dan sebagainya.

Pilgub Banten: Bayangan Dinasti dalam Proses Pra-kandidasi

Pilgub Banten tahun 2017 diluncurkan oleh KPU pada tanggal 3 Agustus 2016 di Alun-alun Kota Serang. Pilgub tahun 2017 merupakan pilgub keempat sejak Banten menjadi provinsi tahun 2000. Pilgub pertama (2001) yang masih dilakukan oleh DPRD menghasilkan pasangan calon terpilih Djoko Munandar dan Ratu Atut Chosiyah; Pilgub kedua (2006) Ratu Atut yang didampingi Masduki terpilih setelah sebelumnya mentake-over jabatan Gubernur setelah Djoko diberhentikan karena kasus korupsi tahun 2005; Pilgub ketiga (2011) Ratu Atut yang didampingi Rano Karno kembali terpilih. Akan tetapi pada periode kedua jabatannya ini Ratu Atut gagal menuntaskan kepemimpinannya setelah diberhentikan pada tahun 2013 karena kasus suap Pilkada Lebak 2013 yang juga menyeret adiknya, Tb. Chaeri Wardana dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar. Tanggal 12 Agustus 2015 Rano dilantik sebagai gubernur menggantikan Ratu Atut.

Pasca pemberhentian Ratu Atut banyak orang menduga --atau lebih tepatnya mungkin berharap-- bahwa dinasti politik keluarga Atut akan segera runtuh dan berakhir. Bahkan sejak penetapan status sebagai tersangka kasus suap Pilkada Lebak 2013, Gandung Ismanto, akademisi Untirta yang rajin mengkritisi kebijakan Pemprov Banten misalnya, meyakini bahwa penetapan tersangka Ratu Atut merupakan suatu guncangan dahsyat yang dampaknya lebih besar dibandingkan guncangan pertama ketika Wawan ditangkap. Gandung menganalogikannya dengan tsunami politik bagi keluarga besar Atut³⁰.

Akan tetapi harapan atau prakiraan itu di kemudian hari ternyata meleset. Hanya berselang

sepuluh hari sejak penetapan status tersangka itu, tepatnya tanggal 27 Desember 2013, Tatu Chasanah, adiknya justru berhasil memenangi kontestasi di arena Musdalub DPD Partai Golkar Banten, mengalahkan rivalnya, Tb. Iman Ariyadi, Walikota Cilegon. Fakta ini menjelaskan dengan sangat lugas, bahwa kekuatan dinasti politik Ratu Atut masih solid dan tidak serta merta dapat digoyahkan dengan mudah.

Sekitar dua bulan kemudian, tepatnya 21 Februari 2014, Tanto Warsono Arban, menantu Ratu Atut juga dilantik menjadi Ketua DPD KNPI Provinsi Banten, meneruskan kepemimpinan Aden Abdul Kholiq yang tidak lain adalah suami Ratu Lilis Karyawati, adik tiri Ratu Atut. Ini adalah fakta kedua yang menjelaskan bahwa soliditas dinasti politik Ratu Atut masih terjaga dan tidak tergoyahkan. Perlu segera dikemukakan dalam kaitan ini, bahwa sejauh ini KNPI Banten juga merupakan salah satu ormas yang berhasil dikooptasi dan menjadi salah satu pilar kekuatan dinasti politik Ratu Atut.

Kemudian Pemilu legislatif 2014, *event* yang dapat menjadi parameter untuk mengukur soliditas dan kekuatan dinasti politik Ratu Atut juga berhasil dilewati dengan sukses. Beberapa anggota keluarga Ratu Atut, terpilih menjadi anggota legislatif baik di pusat maupun di Provinsi Banten. Andika Hazrumy dan Andiara Aprilia Hikmat (keduanya anak Ratu Atut), masing-masing terpilih menjadi anggota DPR RI dan DPD RI. Sementara kedua menantunya, Tanto Warsono Arban dan Ade Rossi Khaerunnisa, masing-masing terpilih menjadi anggota DPRD Banten. Kecuali posisi Ketua Kadin Provinsi Banten yang kini dijabat oleh Mulyadi Jayabaya, mantan Bupati Lebak, berbagai jabatan strategis baik di partai politik maupun ormas (kepemudaan, olahraga, sosial dan budaya) di Banten sejauh ini masih banyak yang diduduki oleh anggota keluarga Ratu Atut.

Fakta paling mutakhir yang dapat menjelaskan dengan lugas, betapa masih solid dan kuatnya dinasti politik Ratu Atut adalah keberhasilan tiga orang anggota keluarganya memenangi Pemilukada serentak 9 Desember 2015 lalu. Mereka adalah Tatu Chasanah (adik kandung) terpilih sebagai Bupati Serang, Airin

³⁰ Kompas, "Dinasti Ratu Atut Goyah", 18 Desember 2013, www.kompas.com, diakses pada 25 Juni 2017.

Rachmy Diani (adik ipar) terpilih menjadi Walikota Tangerang Selatan, dan Tanto Warsono Arban (menantu) terpilih menjadi Walik Bupati Pandeglang (Sutisna, 2017: 53-55). Saat yang sama, salah seorang adik Ratu Atut, Khaerul Jaman, juga masih menduduki jabatan sebagai Wali Kota Serang.

Sementara itu Rano sebagai petahanabukanlah figur politik yang kuat. Secara sosio-historis Rano bukan tokoh yang berkontribusi dalam sejarah pembentukan provinsi ini. Meminjam ungkapan sinisme orang-orang Banten, Rano itu “*teu mais teu meuleum*” (tidak pernah terlibat sedikitpun) dalam arus besar sejarah pembentukan Provinsi Banten. Kemudian secara sosio-kultural Rano juga bukan “orang Banten asli”. Ia adalah *outsider* dalam lanskap sosio-kultural Banten; “tamu” yang tiba-tiba menjadi pemimpin tuan rumah³¹. Satu-satunya kelebihan Rano, setidaknya dalam pandangan para pendukungnya dan/atau dalam pikiran subyektif elemen-elemen masyarakat yang menghendaki perubahan di Banten adalah bahwa ia bukan bagian dari tentakel guritanya dinasti Ratu Atut yang diyakini memiliki komitmen kuat dalam melakukan pemberantasan praktik-praktik korupsi yang selama ini terjadi di Banten.³²

Dalam situasi demikianlah proses pra-kandidasi Pilgub Banten berlangsung. Di satu sisi, kekuatan politik dinasti Ratu Atut masih cukup solid. Ini antara lain ditunjukkan oleh dominasi keluarga dan kerabat Atut di pentas kepemimpinan pemerintahan daerah, dimana 4 dari 8 kabupaten dan kota di Banten dikuasai oleh keluarga dan kerabatnya sebagaimana tampak pada tabel. Selain di arena negara (pemerintahan daerah), seperti dipetakan Sutisna (2017), dominasi keluarga Ratu Atut juga terjadi di arena non-negara seperti Tubagus Chasan Sohib sebagai Ketua KADIN Banten (2002-2012), Tubagus Khaerul Jaman sebagai anggota penasehat dewan KADIN Banten sekaligus juga sebagai Ketua IMI Banten, Ratu Tatu Chasanah sebagai Ketua PMI Banten dan Ketua Forum

³¹ Agus Sutisna, 2017, *op.cit*, hlm.93

³² Wawancara dengan Ranta Suharta, Sekda Provinsi Banten, 10 September 2016 di Banten dan diskusi-diskusi informal dengan Suhada, Yadi Jayasantikadan Abdul Hamid dalam berbagai kesempatan.

Paguyuban Banten Bersatu, Andika Hazrumy sebagai Ketua Karang Taruna Banten, Ketua Tagana Banten dan PW GP Anshor Banten, dan lain-lain yang sejauh ini dengan mudah dikooptasi untuk kepentingan pemenangan keluarga dan kerabatnya dalam kontestasi-kontestasi pilkada maupun pemilu di Banten.

Tabel 1. Keluarga Ratu Atut yang Menjadi Kepala/Wakil Kepala Daerah hingga Menjelang Pilgub 2017

No	Kabupaten/Kota	Kepala/Wakil Kepala Daerah	Hubungan Keluarga
1	Kota Serang	Tb. Khaerul Jaman (Walikota)	Adik
2	Kota Tangerang Selatan	Airin Rachmi Diani (Walikota)	Adik ipar
3	Kabupaten Serang	Tatu Chasanah (Bupati)	Adik
4	Kabupaten Pandeglang	Tanto W. Arban (Wakil Bupati)	Menantu

Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber

Sementara di sisi lain, Rano sebagai petahana secara politik tidaklah terlalu kuat posisinya untuk suatu kontestasi pilkada yang semakin kental nuansa subyektifitas lokalnya terutama oleh sebab alasan yang bersifat sosio-kultural seperti diuraikan di depan. Dalam hampir semua pilkada, petahana biasanya relatif mudah menentukan siapa bakal calon pendampingnya. Karena petahana pada umumnya memiliki keunggulan atau kelebihan situasional dibandingkan para penantangannya. Keunggulan situasional yang dimaksud tentu berkaitan dengan jabatan yang sedang diembannya, misalnya popularitas, peluang mengendalikan birokrasi, peluang memanfaatkan berbagai fasilitas yang melekat dalam jabatannya; dan peluang mengkooptasi berbagai elemen masyarakat terutama melalui jalan memanfaatkan program dan kebijakan pemerintah. Keunggulan dan situasi-situasi yang potensial “menguntungkan” ini tentu juga dimiliki oleh Rano sebagai petahana. Akan tetapi dimensi sosio-kultural figuritasnya membuat insentif-insentif politik itu terdegradasi sedemikian rupa; dan ini kemudian semakin diperlemah oleh fakta bahwa keluarga dinasti Ratu Atut masih cukup solid secara politik.

Situasi itulah yang diduga kuat menjadi penyebab mengapa kemudian Rano sempat mengalami kesulitan menentukan figur bakal calon pendampingnya sebelum akhirnya, pada saat-saat akhir tahapan pencalonan, ia mendeklarasikan Embay Mulya Syarif sebagai pendampingnya pada tanggal 23 September 2016

sekaligus mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Banten.

Berdasarkan wawancara dan diskusi-diskusi informal dengan para narasumber³³ serta pengamatan atas fenomena dinamis yang terjadi dalam lanskap proses pra-kandidasi Pilgub, salah satu faktor penyebab tidak mudahnya Rano menentukan figur bakal calon pendampingnya memang karena adanya bayang-bayang kekuatan politik dinasti Ratu Atut. Jika disederhanakan situasi kalkulatifnya dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Rano menyadari bahwa sebagai petahana posisinya tidak cukup kuat jika harus bertarung *head to head* melawan dinasti Atut tanpa sokongan yang memadai dari publik dan/atau figur publik yang populer secara sosial sekaligus memiliki kemampuan yang kuat secara ekonomi; (2) Rano juga menyadari bahwa para penantangannya, selain merupakan tokoh-tokoh kuat di Banten (antara lain : Wahidin Halim, dua kali menjabat Walikota Tangerang; Mulyadi Jayabaya, dua kali menjabat Bupati Lebak; Taufik Nuriman, dua kali menjabat Bupati Serang), juga berasal dari keluarga Ratu Atut (Khaerul Jaman, adik Ratu Atut, Walikota Serang) dan Andika Hazrumy, anak Ratu Atut, anggota DPR RI); (3) Rano terlanjur “terbebani” secara politik oleh komitmennya sendiri untuk tidak berpasangan dengan keluarga Ratu Atut; dan “beban” ini justru semakin besar ketika komitmen anti-dinastinya mendapat dukungan publik yang meluas; dan akhirnya, (4) Rano mungkin juga menyadari bahwa siapapun figur yang bakal jadi kompetitornya, jika sang figur itu tandem dengan keluarga Ratu Atut, pastilah akan menjadi lawan yang sangat kuat. Karena itu ia harus benar-benar menghitung dengan cermat siapa bakal calon pendampingnya.

Kandidasi: Semangat Perubahan di Tengah Arus Politik Identitas

Masa pendaftaran paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada Pilkada serentak tahun 2017 berlangsung selama 3 (tiga) hari, yakni : 21-23 September 2016 (PKPU Nomor 4 Tahun

³³ Wawancara dengan YJ (Wartawan), RS (Sekda Provinsi Banten), AN (Akademisi Unma), BP dan AH (Akademisi Untirta), ATN (Tokoh Masyarakat), MH (Wartawan), TDS (Pengusaha), SK (Sekretaris KPU Banten) dan OS (Tokoh Masyarakat) sepanjang bulan Agustus-September 2016.

2016). Paslon Wahidin Halim dan Andika Hazrumy mendaftar ke KPU Banten tanggal 22 September 2016, sementara paslon Rano Karno dan Embay Mulya Syarif mendaftar tanggal 23 September 2016³⁴. Paslon Wahidin-Andika dicalonkan oleh koalisi besar Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, Hanura, PAN dan PKS. Sedangkan Rano-Embay dicalonkan oleh koalisi PDIP, PPP dan Partai Nasdem. Berikut perolehan kursi DPRD Banten dari tiap partai.

Tabel 2. Perolehan Kursi DPRD Banten Pemilu 2014

Partai	Perolehan Kursi DPRD Banten
Nasdem	5 kursi
PKB	7 kursi
PKS	8 kursi
PDIP	15 kursi
Golkar	15 kursi
Gerindra	10 kursi
Demokrat	8 kursi
PAN	3 kursi
PPP	8 kursi
Hanura	6 kursi
Jumlah	85 kursi

Sumber: www.dprd-bantenprov.go.id

Setelah melewati tahapan verifikasi berkas pendaftaran (termasuk pemeriksaan kesehatan) selama kurang lebih satu bulan, pada tanggal 24 Oktober 2016 kedua paslon ini ditetapkan oleh KPU Banten; dan sehari sesudahnya pada tanggal 25 Oktober 2016 KPU Banten melakukan Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Paslon. Hasil pengundian paslon Wahidin-Andika mendapatkan nomor urut 1 dan paslon Rano-Embay mendapatkan nomor urut 2.³⁵

³⁴ Selain kedua paslon yang diusung koalisi partai politik ini, ada beberapa paslon perseorangan yang sempat mendaftarkan diri dengan menyerahkan berkas dukungan calon perseorangan pada tanggal 6-10 Agustus 2016. Tetapi Tidak ada satupun yang memenuhi syarat dukungan. Keempat paslon perseorangan itu antara lain; Dimiyati Natakusumah dan Yemmelia Wiryanto, Ampri Tanudjiwa dan Yeyen Maryani, Yayan Sofyan dan Ratu Enong, dan Tubagus Sangadiah dan Subari Martadinata.

³⁵ Nomor urut Rano-Embay (2), meski tentu hanya sebuah kebetulan, pada masa kampanye oleh para relawan dan pendukung Wahidin-Andika dikapitalisasi sedemikian rupa sebagai alat kampanye untuk mendegradasi dukungan pemilih terhadap Rano-Embay dengan cara mengidentikkan nomor

Pendaftaran paslon Rano-Embey pada hari terakhir dari jadwal pendaftaran bukan suatu kebetulan atau sebaliknya, sudah direncanakan sebelumnya. Melainkan lebih karena alotnya mencapai kesepakatan dan pengambilan keputusan di internal koalisi partai-partai pengusung dengan Rano sendiri tentang siapa figur yang akan mendampinginya. Ada 3 (tiga) nama yang diusulkan oleh DPD PDIP Banten ke DPP PDIP sebagai bakal calon pendamping Rano, yaitu : Khaerul Jaman (Walikota Serang, adiknya Ratu Atut), Ahmad Taufik Nuriman (Mantan Bupati Serang), dan Ranta Suharta (Sekda Provinsi Banten). Itulah sebabnya pada waktu DPP PDIP mengumumkan para paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung oleh PDIP dan/atau partai-partai koalisinya beberapa hari menjelang penutupan masa pendaftaran, untuk Pilgub Banten, DPP PDIP hanya menghadirkan Rano Karno di panggung pengumuman yang disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi nasional, minus bakal calon pendampingnya. Nama Embey Mulya Syarif sendiri baru dirilis ke publik sebagai bakal calon pendamping Rano satu atau dua hari setelah pengumuman resmi di televisi itu. Penulis sendiri menerima informasi akurat bahwa Embey akan mendampingi Rano pada hari Rabu (sore), 21 September 2016.³⁶ Informasi ini lengkap dengan rencana deklarasi sekaligus pendaftaran ke KPU yang akan dilaksanakan pada luas, hari Jumat, 23 September 2016.

Alotnya pengambilan keputusan tentang siapa yang akan mendampingi Rano disebabkan oleh adanya tarik-menarik pertimbangan dan kepentingan, baik antara Rano dengan PDIP dan partai koalisinya maupun di antara partai-partai koalisi sendiri. Konstelasi tarik-menarik pertimbangan dan kepentingan itu dapat dijelaskan berikut ini. *Pertama*, sebagaimana telah disinggung di depan, Rano tidak menghendaki calon pendampingnya berasal dari keluarga/kerabat Ratu Atut. Tetapi ia juga tidak serta merta dapat menerima figur yang disediakan oleh DPP PDIP dan/atau partai koalisinya. Dalam hal ini

tersebut dengan nomor urut Ahok-Djarot yang secara kebetulan juga berangka 2 sebagai nomor urut paslon penista agama.

³⁶ Informasi didapatkan penulis dari YJ, RS dan EMS sendiri melalui pesan *whatsapp*.

Rano memiliki preferensi sendiri tentang figur bakal pendampingnya. Dari ketiga nama yang diusulkan tadi, Rano cenderung memilih Ranta Suharta; sedangkan DPP PDIP condong kepada Khaerul Jaman yang juga lebih dikehendaki oleh DPD PDIP Banten. Sementara itu, baik PPP maupun Nasdem tidak menghendaki keduanya. Sebagian bagian dari koalisi, PPP dan Nasdem memiliki opsi sendiri. PPP cenderung ke Taufik Nuriman atau kadernya sendiri, Mardiono atau Embey Mulya Syarif, yang keduanya sama sekali tidak pernah terpublikasi di media manapun sebagai bakal calon, baik untuk gubernur maupun wakil gubernur. Sementara Nasdem (meski tidak bersikeras, cukup kompromistis) menghendaki kadernya sendiri, Wawan Iriawan (Ketua DPD Partai Nasdem Banten).

Kedua, alasan DPP PDIP lebih memilih Jaman selain karena secara finansial (kesiapan logistik) yang paling unggul dan mendapat dukungan solid dari DPD-DPP PDIP se-Banten, juga karena faktor lawan. Dengan memasang Jaman sebagai pendamping Rano, soliditas keluarga Ratu Atut dan Golkar Banten akan terpecah; dan dengan sendirinya akan menggerus suara Andika yang sudah lebih dulu dideklarasikan berpasangan dengan Wahidin. Pada saat yang sama, DPP PDIP juga menolak Ranta dan Nuriman, dengan alasannya sendiri-sendiri. Ranta, selain secara finansial tidak masuk dalam kategori “siap membiayai” Pilgub, ia juga dinilai bukan figur populer yang dapat mendulang suara signifikan. Sementara Nuriman dianggap memiliki “cacat politik” oleh beberapa fungsionaris DPP PDIP terkait pernyataannya di media massa yang menghubungkan gejala kebangkitan PKI/Komunisme dengan PDIP. Ribka Tjiptaning (penulis buku *Aku Bangga Jadi Anak PKI*) adalah fungsionaris DPP PDIP yang sangat vokal menyuarakan penolakan atas Nuriman.

Deadlock. Inilah yang terjadi dalam komunikasi dan negosiasi pertimbangan dan kepentingan terutama antara Rano dengan partai induknya, PDIP, pada hari-hari menjelang penutupan masa pendaftaran pasangan calon. Dan pada saat ini pula PPP kemudian hadir membawa dan mengusulkan figur alternatif yang selama masa pra-kandidasi sebelumnya tidak pernah

disebut-sebut, pun tidak pernah mendaftarkan diri ke partai manapun selama proses penjaringan oleh partai-partai politik. Figur itu adalah Embay Mulya Syarif, anggota Majelis Syariah DPW PPP Banten. Jatuhnya pilihan terakhir pada sosok Embay tampaknya didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut; dengan pertimbangan mana, baik pihak Rano maupun DPP PDIP dan DPP Nasdem akhirnya menyetujui.

Pertama, Embay adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah pembentukan Provinsi Banten; ia juga putra asli Banten dan selama hidupnya praktis berkiprah di Banten, baik sebagai pengusaha maupun sebagai aktifis. Latar belakang ini penting untuk menutupi celah kelemahan aspek historis dan sosio-kultural yang dapat menjadi sasaran empuk dari serangan/propaganda bernuansa politik identitas pihak lawan yang melekat pada Rano. *Kedua*, Embay dikenal sebagai aktifis dan tokoh Islam; berasal dari kalangan santri sekaligus jawara. Posisi ini penting untuk mengurangi potensi resistensi masyarakat terhadap stigma PDIP sebagai partai sekuler dan kerap dianggap kurang ramah terhadap kepentingan umat Islam. Selain itu, sosok sebagai jawara juga penting untuk mengimbangi kelompok jawara yang berbaris di kubu Wahidin-Andika. *Ketiga*, Embay juga dikenal sebagai figur yang bersih, berintegritas, tidak pernah terlibat dalam kasus-kasus korupsi yang diduga atau sudah terbukti dilakukan oleh keluarga Ratu Atut, meskipun ia memiliki hubungan dekat dengan ayahanda Ratu Atut, Chasan Sohib. Pertimbangan ketiga inilah kemudian yang banyak dikampanyeukan kepada masyarakat oleh timses dan relawan-relawan pendukungnya. Embay diposisikan sebagai simbol perubahan sekaligus simbol dari semangat perlawanan untuk menyudahi era dinasti korup di Banten.

Keputusan Rano dan koalisi PDIP, PPP dan Nasdem mengambil Embay sebagai Cawagub mendampingi Rano mendapat sambutan sangat positif terutama dari elemen-elemen masyarakat sipil yang sudah muak dengan praktik-praktik dinasti dan korupsi di Banten. Sejumlah tokoh, termasuk mereka yang sempat mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur atau wakil gubernur ke partai-partai koalisi, baik yang

kemudian menjadi pengusung paslon Wahidin-Andika maupun paslon Rano-Embay, secara terbuka memberikan dukungan dan bahkan bersedia menjadi bagian dari tim kampanye Rano-Embay. Beberapa tokoh (non-struktural partai) yang mendukung Rano-Embay antara lain : Taufiequrrahman Ruki (mantan Ketua KPK), Mochtar Mandala (tokoh pembentukan Provinsi Banten), Taufik Nuriman (mantan Bupati Serang), Mulyadi Jayabaya (mantan Bupati Lebak), Daenulhay (mantan Dirut PT. Krakatau Steel), Hasan Gaido (pengusaha travel), Gola Gong (*founder* dan pemilik komunitas Rumah Dunia), Ali Nurdin (akademisi), dan Uday Suhada (aktifis LSM).

Dengan kehadiran tokoh-tokoh asli Banten di barisan pendukungnya itu, Rano dan koalisi partai pengusung pencalonannya tentu berharap politik identitas yang mulai mengarus dan digunakan oleh tim Wahidin-Andika sebagai strategi kampanye untuk mendegradasi popularitas dan elektabilitas Rano-Embay dengan “menyerang” sosok Rano sebagai bukan “orang Banten” sekaligus tidak pernah punya jejak kontribusi terhadap perjuangan mewujudkan Provinsi Banten dapat diredam sedemikian rupa, atau setidaknya dapat diminimalisasi potensi pengaruh buruknya. Selain itu, kehadiran mereka juga diharapkan menjadi penegas atas komitmen dan visi kepemimpinan masa depan Rano-Embay yang anti-dinasti sekaligus anti-korupsi.

Kampanye : Isu Dinasti Meredup, Politik Identitas Menguat

Sejak perhelatan Pilgub Banten 2017 diluncurkan pada awal Agustus 2016, isu politik yang paling mendapat sorotan publik adalah praktik dinasti yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah selama memimpin provinsi ini antara tahun 2005-2013. Isu ini meluas bukan hanya pada kalangan masyarakat yang secara politik *literate* seperti mahasiswa, aktifis, pers, akademisi dan elemen-elemen *civil society* lainnya, tetapi juga pada kalangan masyarakat awam. Pada umumnya mereka menolak politik dinasti, terlebih yang sudah terbukti berdampak pada merebaknya praktik-praktik korupsi dan kolusi.

Akan tetapi agak berbeda posisi penyikapannya pada kalangan elit-elit partai politik dan tokoh-tokoh yang memiliki minat dan rencana untuk maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Kecuali hanya beberapa orang yang secara terbuka mengungkapkan penolakannya terhadap politik dinasti, sikap umum mereka cenderung *wait and see*, bahkan sebagian ada yang permisif, dan siap bernegosiasi jika situasi membutuhkan.³⁷Sikap permisif ini semakin kentara dan meluas terutama setelah peta kandidasi mengerucut pada dua kubu : Rano sebagai petahana yang secara terbuka tidak akan berpasangan dengan keluarga/kerabat Ratu Atut meski Jaman (adik Atut) dan timnya terus berupaya agar Rano mengambil Jaman sebagai pendampingnya di satu sisi, dan kubu Wahidin sebagai penantang paling populer dan konsisten memperjuangkan pencalonannya (terutama melalui Partai Demokrat) yang kemudian mencapai titik temu komunikasi politik dengan Partai Golkar untuk mengusulkan Andika sebagai calon pendamping Wahidin.

Dengan alasan *fatsoen* politik, semua elit dan tokoh partai koalisi pengusung Wahidin-Andika akhirnya berusaha keras meredam isu dinasti korup untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas paslonnya. Dengan cara demikian, perlahan isu dinasti meredup (setidaknya tidak lagi menjadi isu tunggal perhatian publik) di pentas sosialisasi dan kampanye pilgub. Pada saat yang sama koalisi pengusung Wahidin-Andika mulai mengedepankan isu-isu politik identitas untuk mendegradasi popularitas dan elektabilitas Rano-Embey. Dalam konteks ini isu-isu yang paling sering dibuka dan dikedepankan sebagaimana telah disinggung di depan adalah bahwa Rano “bukan orang Banten”; Rano “tidak memiliki jejak kontribusi” dalam sejarah pembentukan Provinsi Banten; Rano bahkan ber-KTP DKI Jakarta.³⁸Dan keputusan Rano dan timnya mengambil Embey sebagai calon

³⁷ Sikap yang cenderung ambigu ini tampak dari wawancara dan diskusi-diskusi informal penulis dengan beberapa tokoh yang dipublish media dan/atau menyatakan diri akan maju dalam proses pencalonan pilgub, dan beberapa aktifis yang memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh tersebut.

³⁸ Sosialisasi atau kampanye negatif ini secara masif dilakukan oleh para relawan Wahidin-Andika terutama melalui jejaring media sosial.

pendampingnya hanyalah akal-akalan politik untuk dijadikan *bumper* kompetisi saja; Embey hanya akan dimanfaatkan.

Kampanye yang sudah menyerupai propaganda dengan menggunakan isu politik identitas ini semakin kencang dan menemukan momentum pembenarannya setelah terjadi kasus *blasphemy* (penistaan agama) yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta. Suatu kasus yang telah memicu kemarahan umat Islam dan berujung kemudian pada bangkitnya politik sektarian di Jakarta. Ahok yang berasal dari golongan minoritas, agama maupun etnik, dipandang tidak pantas memimpin Jakarta yang mayoritas muslim dan pribumi. Koneksitas isu blasphemy oleh Ahok ini dengan Pilgub Banten, sebagaimana telah dijelaskan di depan terletak pada partai pengusung utama pencalonan baik Ahok maupun Rano. Keduanya sama-sama dicalonkan oleh koalisi partai politik yang dipimpin PDI Perjuangan, partai yang dinilai oleh sebagian warga Banten kerap memusuhi umat Islam dan menjadi sarang berkiprahnya kader-kader PKI.³⁹

Demikianlah, prosesi kampanye Pilgub Banten 2017 akhirnya lebih banyak dipenuhi dengan propaganda saling menyerang daripada mendiskusikan ide-ide program yang mencerdaskan. Kubu Rano-Embey mengandalkan isu dinasti yang sebetulnya sudah cukup lama menarik perhatian publik, tetapi kemudian meredup seiring dengan proses pemetaan koalisi partai dalam pencalonan. Sementara kubu Wahidin-Andika mengandalkan isu politik identitas yang kemudian disempurnakan oleh isu politik sektarian yang bangkit belakangan menyusul kasus penistaan agama oleh Ahok, yang tidak lain merupakan kolega politik Rano dalam perhelatan pilkada serentak 2017, dan cukup berhasil meredam isu dinasti.

Dampak Electoral Blasphemy

Kasus penistaan agama (*blasphemy*) oleh Ahok bermula dari ceramahnya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September

³⁹ Koneksitas ini misalnya digambarkan melalui foto-foto yang menunjukkan kemesraan Rano-Embey dengan Ahok dan Megawati di pesawat dalam penerbangan ke Blitar untuk keperluan ziarah ke makam Bung Karno, yang diviralkan di media sosial.

2016. Dalam ceramahnya, Ahok menyinggung Al Quran Surat Al Maidah ayat 51, yang dalam pandangannya surat dan ayat ini kerap dipakai oleh para politisi (lawan-lawan politiknya) untuk membohongi umat Islam agar tidak memilih pemimpin non-muslim. Kajian ini tentu tidak akan masuk ke dalam perdebatan substansi ayat 51 Al Maidah itu, melainkan lebih kepada dampak yang diakibatkan oleh ceramah tersebut dalam konteks perhelatan pilkada serentak tahun 2017, khususnya dampak elektoral yang mengarus deras bukan saja pada ruang perhelatan Pilkada DKI Jakarta, tetapi juga mengalir ke ruang perhelatan Pilkada Banten.

Isi ceramah itu kemudian diunggah di akun *facebook* Buni Yani pada tanggal 6 Oktober 2016 dan menjadi viral di berbagai media sosial. Di kemudian hari dampak pengungkahan ini luar biasa, telah memicu kemarahan besar umat Islam, bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah, khususnya Banten yang secara geografis bersentuhan dengan DKI Jakarta. Rangkaian aksi dengan tajuk “Bela Islam dan Bela Ulama” kemudian terjadi; dimulai pada tanggal 14 Oktober 2016 di halaman Balai Kota DKI, kemudian disusul oleh aksi yang lebih kolosal pada tanggal 4 November (dikenal dengan Aksi 411) dan aksi yang lebih dahsyat lagi pada tanggal 2 Desember 2016 (dikenal dengan Aksi 212). Setelah kedua aksi besar ini, beberapa rangkaian demonstrasi masih terus berlanjut hingga menjelang pemungutan dan penghitungan suara pilkada serentak pada tanggal 15 Pebruari 2017. Pasca desakan umat Islam yang luar biasa itu, setelah melalui proses gelar perkara oleh Mabes Polri, tanggal 16 November 2016 Ahok ditetapkan sebagai Tersangka kasus dugaan penistaan agama⁴⁰.

Secara hukum kasus dugaan penistaan agama itu sudah selesai dan tuntas dengan divonisnya Ahok oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Mei 2017. Majelis Hakim yang diketuai oleh Dwiarso Budi Santiarso menyatakan bahwa, terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan

tindak pidana melakukan penodaan agama; dan menghukumnya dengan 2 (dua) tahun penjara⁴¹.

Sebagaimana telah disinggung di depan, kasus penistaan agama oleh Ahok ini telah meluas sedemikian rupa, menjadi semacam “bola liar” politik pilkada yang mempengaruhi bukan saja dinamika pilkada di DKI Jakarta, melainkan juga pilkada di beberapa daerah, khususnya di Banten. Dalam konteks Banten, pengaruh negatif kasus ini berupa penurunan popularitas dan elektabilitas paslon Rano-Embey yang sama-sama dicalonkan oleh koalisi yang dipimpin PDIP.⁴²

Situasi itu dimungkinkan oleh karena beberapa faktor berikut : (1) Kedekatan bahkan persentuhan geopolitik pilkada antara Banten dan DKI Jakarta; (2) Kesamaan posisi kandidasi Rano dengan Ahok sebagai kandidat yang dicalonkan oleh PDIP, partai yang dalam pandangan sebagian warga Banten dianggap kerap menyakiti umat Islam; (3) Kasus blasphemy yang terus membesar dan meluas simultan dengan tahapan kampanye pilgub itu terkapitalisasi secara alamiah menjadi isu strategis yang mengalahkan isu dinasti dan korupsi yang sebelumnya merebak di masyarakat yang dekat dengan paslon Wahidin-Andika.

Paslon Rano-Embey yang pada waktu dideklarasikan tanggal 23 September 2016, beberapa hari sebelum ceramah Ahok di Pulau Pramuka yang menuai protes dan amarah besar umat Islam itu, mendapat sambutan meriah dari berbagai kalangan. Ini misalnya dapat dilacak, baik pada *timeline* jejaring media sosial warga Banten (terutama *facebook*, dan komunitas grup-grup *whatsApp* yang penulis ikuti dan cermati), pemberitaan di media cetak lokal maupun dalam perbincangan dan diskusi-diskusi informal di berbagai ruang publik di Banten. Pasca kasus Pulau Pramuka itu, terutama setelah muncul Aksi 411 sambutan dan dukungan terhadap Rano-Embey mulai mengendur.

Terkait Aksi 411 itu ada sebuah “blunder politik” yang dilakukan oleh Embey Mulya Syarif. Calon Wagub pendamping Rano ini menghimbau agar warga Banten tidak perlu mengikuti seruan aksi dan datang ke Jakarta. Lebih baik, demikian

⁴⁰ Kompas, “Kaleidoskop 2016: Timeline” Penetapan Ahok sebagai Terdakwa Penodaan Agama,” 14 Desember 2016, www.kompas.com, diakses pada 25 Juni 2017.

⁴¹ Lihat: news.detik.com, 9 Mei 2017

⁴² Wawancara dan diskusi-diskusi informal dengan para narasumber YJ, OS, MH, dan MM dalam beberapa kesempatan terpisah.

ungkapnya sebagaimana dikutip oleh sejumlah *media online* di Banten, “kita doakan agar Ahok mendapatkan hidayah”.⁴³ Berita ini dengan mudah kemudian dimaknai oleh publik, baik para pendukung dan simpatisan Wahidin-Andika maupun warga yang sebelumnya mendukung Rano-Embey sebagai “pembelaan” Paslon Rano-Embey terhadap Ahok, dan dengan cepat menjadi viral di media sosial.

Dukungan terhadap Rano-Embey semakin tergerus ketika aksi-aksi dan pemberitaan anti-Ahok terus berlanjut dan semakin masif di berbagai media dan ruang-ruang publik. Dalam rentang waktu antara Desember 2016 (setelah Aksi 212) hingga Januari 2017, beberapa narasumber riset, baik yang merupakan pendukung dan simpatisan Rano-Embey maupun pendukung dan simpatisan Wahidin-Andika mengkonfirmasi, bahwa telah terjadi pembalikan situasi sedemikian rupa sebagai dampak kasus Ahok. Isu anti-dinasti dan anti-korupsi yang menjadi alat bidik untuk membangun dan memobilisasi sikap antipati terhadap Wahidin-Andika serta mendegradasi popularitas dan elektabilitasnya semakin meredup digantikan oleh isu anti-Ahok, anti-PKI dan anti-China yang disematkan pada paslon Rano-Embey. Yang lebih menarik lagi, beberapa tokoh dan aktifis yang semula kencang mendukung Rano-Embey, bahkan banyak yang secara perlahan dan diam-diam menarik dukungannya. Meski disertai dengan pernyataan bahwa menarik dukungan terhadap Rano-Embey tidak berarti kemudian mengalihkannya kepada Wahidin-Andika,⁴⁴ sedikit banyak sikap ini tetap berdampak pada semakin tergerusnya potensi suara untuk Rano-Embey.

Indikator penting lainnya yang mengisyaratkan bahwa kasus Ahok berdampak negatif terhadap preferensi warga Banten, meski tidak sampai menggerus banyak suara Rano-Embey tampak pada kenyataan bahwa Wahidin-Andhika hanya menang di dua daerah, yakni Kota Tangerang (Kota yang pernah dipimpin Wahidin) dan Kabupaten Serang

(Kabupaten yang dipimpin tantenya Andhika). Di enam daerah lain, dimana Wahidin-Andhika sesungguhnya memiliki akses politik kuat terhadap kepala daerah karena koneksitas basis partai dan politik kekerabatan pasangan ini kalah.

Di Kota Cilegon, Walikotanya kader Golkar; di Kota Serang, Walikotanya paman Andhika; di Kota Tangsel, Walikotanya tantenya Andhika; di Kabupaten Pandeglang, Wabupnya adik ipar Andhika; di Kabupaten Tangerang, Bupatiya kader Golkar; dan di Kabupaten Lebak, Bupatiya kader Demokrat, Wahidin-Andhika gagal meraih kemenangan. Koneksitas dan afliabilitas politik dan kekerabatan yang tidak berbanding lurus dengan raihan suara mereka. Artinya, “di atas kertas” koneksitas dan afliabilitas politik dan kekerabatan ini tidak memberi kontribusi kemenangan bagi Wahidin-Andhika. Dengan demikian, kemenangan Wahidin-Andhika memang sangat “terbantu” oleh meluasnya kasus Ahok yang berkontribusi negatif bagi Rano-Embey.

Fakta-fakta dan sebagian asumsi itu sekaligus dapat dibaca dalam logika sebaliknya, bahwa andai saja, sebutlah “Ahok Effect” ini tidak bekerja secara efektif-negatif bagi Rano-Embey, peluang pasangan ini untuk memenangi kontestasi cukup besar. Ini terbukti dengan keberhasilan mereka menguasai enam daerah yang justru dipimpin oleh Bupati dan Walikota yang berada di kubu politik elektoral Wahidin-Andika seperti dipetakan di atas, yakni : Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Lebak.

Rapat Pleno KPU Banten, Minggu 26 Februari 2017, menetapkan paslon Wahidin Halim-Andika Hazrumy sebagai pemenang kontestasi Pilgub Banten 2017, dengan perolehan suara 2.411.213 (50,95%), 89.890 (1,90%) lebih banyak dari perolehan suara paslon Rano Karno-Embey Mulya Syarif sebesar 2.321.323 (49,05%).

Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, selain berakar budaya Islam yang kokoh, masyarakat Banten juga memiliki karakteristik primordialis (keterikatan

⁴³ Lihat: www.Banten Hits.com, 3 November 2016.

⁴⁴ Wawancara dan diskusi-diskusi informal dengan SR, Koordinator Perguruan Tinggi La Tansa Mashiro Rangkasbitung; EJ, dosen STIE Bina Bangsa Serang dan redaktur majalah online *biem.co*; dan OS, tokoh masyarakat Serang.

pada etnik, budaya dan daerah) yang relatif kuat. Faktor inilah, selain kesejarahan, yang pada akhir dekade 1990-an bangkit kembali (melanjutkan perjuangan membentuk provinsi di tahun 60-an dan awal 70-an) menjadi pemicu semangat membentuk provinsi sendiri yang terpisah dari Jawa Barat. Dalam konteks ini pula, sejak awal (terutama sejak menggantikan posisi Ratu Atut sebagai gubernur), secara sosio-kultural dan sosio-politik sosok Rano Karno kurang dapat diterima sebagai pemimpin Banten.

Kedua, kecenderungan primordialistik (yang mewujudkan dalam bentuk politik identitas) ini pula yang mengemuka sebagai isu penting (selain isu tolak dinasti) ketika proses pra-kandidasi dan proses kandidasi berlangsung pada perhelatan Pilgub 2017 dengan sasaran bidik Rano Karno yang secara *de facto* memang “bukan orang Banten” dan tidak memiliki kontribusi sejarah terutama dalam pembentukan Provinsi Banten.

Ketiga, dalam suasana etnosentristikwarga Banten itu pilihan Rano dan koalisi pengusungnya yang dipimpin PDIP mengambil Embay Mulya Syarif sebagai calon Wakil Gubernur merupakan langkah yang tepat untuk meminimalisasi pengaruh buruh politik identitas terhadap popularitas dan elektabilitasnya; dan terbukti sempat mendapatkan simpati terutama dari elemen-elemen masyarakat sipil yang sudah muak dengan politik dinasti dan kasus-kasus korupsi yang ditimbulkannya di Banten, termasuk sejumlah tokoh nasional asal Banten.

Keempat, akan tetapi, strategi dan ikhtiar sebagaimana tesis pada butir ketiga itu kemudian tidak efektif ketika muncul kasus dugaan penistaan agama (*blasphemy*) yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur petahana DKI Jakarta. Kasus yang memicu kemarahan besar umat Islam hingga melahirkan rangkaian aksi bela Islam dan bela Ulama itu berpengaruh negatif terhadap popularitas dan elektabilitas Rano-Embay di Banten. Hal ini dimungkinkan oleh beberapa faktor penyebab, yakni : (a) kedekatan, bahkan persentuhan geopolitik pilkada antara Banten dan DKI Jakarta; (b) kesamaan posisi kandidasi Rano dengan Ahok sebagai kandidat yang dicalonkan oleh PDIP, partai yang dalam pandangan sebagian warga Banten dianggap kerap menyakiti umat

Islam; (c) kasus blasphemy yang terus membesar dan meluas simultan dengan tahapan kampanye pilgub itu terkapitalisasi secara alamiah menjadi isu strategis yang mengalahkan isu dinasti dan korupsi yang sebelumnya merebak dalam masyarakat yang dekat dengan paslon Wahidin-Andika

Kelima, kasus blasphemy itu semakin “sempurna” dan determinatif sebagai isu politik pilkada yang berhasil mendegradasi sedemikian rupa popularitas dan elektabilitas Rano-Embay dengan disertakannya isu-isu kebangkitan PKI/Komunisme dan anti-China, yang keduanya (dalam persepsi sebagian warga Banten) dianggap melekat pada PDIP dan Ahok. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Rano-Embay dan timnya untuk mengcounter isu-isu panas yang sebagiannya lebih merupakan asumsi-asumsi politik daripada fakta itu. Namun aura politik identitas yang bertemu dengan fakta kasus blasphemy telah berkembang, meluas dan tumbuh sedemikian rupa di pentas perhelatan pilgub, sehingga upaya-upaya Rano-Embay dan timnya gagal membendung pengaruhnya terhadap preferensi politik warga Banten. Akibatnya, Rano-Embay, meski terpaut di belakang hanya 1.9% suara, gagal memenangi Pilgub Banten 2017.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdillah, Ubed, *Politik Identitas Etnis, Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: IndonesiaTera, 2002.
- Abdul, Hamid, *Observation of Democratic Decentralization in Indonesia during 2009–2014: Political Dynasty in Banten Province and Populism in Jakarta Province*. Kyoto: Graduate School of Global Studies, Doshisha University, 2016.
- Agustino, Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Agustino, Leo, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Castells, Manuell, *The Power of Identity, Second Edition with a New Preface*. Oxford: Blackwell Publishing, 2010. Diamond, Larry, *Introduction : Political Culture and Democracy*, dalam *Political Culture and Democracy in Developing*

Contries. London : Lynne Reinner Publisher, 1994.

Erb, Maribeth dan Priyambudi Sulistyanto (eds)., *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore : ISEAS, 2009.

Haris, Syamsuddin (ed), *Partai dan Parlemen Lokal : Era Transisi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: LIPI, 2007.

Huntington, Samuel, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1991.

March, James dan Johan P. Olsen, *Democratic Governance*. New York: The Free Press, 1995.

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Maarif, Ahmad Syafii, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project, 2012.

Sutisna, Agus, *Memilih Gubernur, Bukan Bandit: Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017.

Schulte Nordholt, Henk dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Jurnal

Djati, Raharjo Wasisto, "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi : Dinasti Politik di Aras Lokal," *Jurnal Sosiologi Masyarakat*. Vol. 18, No. 2 (Juli 2013).

Fox, Colm dan Jeremy Menchik, "The Politics of Identity in Indonesia: Results from Campaign Advertisements,". APSA Annual Meeting Paper, 2011.

Hadiz, Vedi R., *Decentralisation and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*, *Search Working Paper*, No.47, Hong Kong, (2003).

Nusi, Arfan, "Pemikiran Islam dalam Bingkai Pergolakan Politik Sektarian," *Jurnal Yaqzhan*, Vol.2, No.2 (2016).

Sutisna, Agus, "Gejala Proliferasi Dinasti Politik di Banten Era Kepemimpinan Gubernur Ratu Atut Chosiyah," *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. Vol. 2, No.2, (Juli 2017).

Von Bruinessen, Martin, "Shari'a Court, Tarekat and Pesantren: Religious Institutions in the Sultanate of Banten," *Archipelago Journal*, (1995): 165-200.

Sumber Online

BPS Provinsi Banten, www.banten.bps.go.id, 2015.

Kompas, "Dinasti Ratu Atut Goyah", 18 Desember 2013 dalam www.kompas.com.

Kompas, "Kaleidoskop 2016: Timeline" Penetapan Ahok sebagai Terdakwa Penodaan Agama", 14 Desember 2016 dalam www.kompas.com.

Murtadho, Roy, "Politik Sektarianisme: Benarkah Jakarta Telah Jatuh ke Tangan Kaum Intoleran", 28 April 2017, dalam <https://indoprogress.com/2017/04/politik-sektarianisme-benarkah-jakarta-telah-jatuh-ke-tangan-kaum-intoleran/>.

Priyono, A.E., "Anti Kafir Politics in Local Election: Jakarta and Medan Case," dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/18/anti-kafir-politics-local-election-jakarta-and-medan-case.html>.

www.kpu.go.id

www.data.jakarta.go.id.

Wawancara

Wawancara dengan AN dan BP, 12 Oktober 2016 di Serang.

Wawancara dengan AH dan YJ, akademisi, 2 Oktober 2016 di Serang.

Wawancara dengan RS, 10 September 2016 di Serang.

Wawancara dengan ATN, MH, TDS, SK, dan OS, Agustus-September 2016 di Provinsi Banten.

Wawancara dengan SR dan EJ, 12 September 2016 di Serang.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui aisahputrib@gmail.com.

Agus Sutisna

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Muhamadiyah Tangerang. Menyelesaikan pendidikan doctoral di Universitas Nasional, Jakarta. Saat ini penulis menjadi anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023. Aktif menulis tentang kepemiluan dan demokrasi di berbagai jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: tisna_1965@ymail.com.

Firman Noor

Penulis merupakan peneliti senior sekaligus professor riset pada Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Australian National University dan S3 di Universitas Exeter, Inggris. Karya-karya akademisnya banyak diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional maupun buku terkait kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui Email: firman.noor@yahoo.co.id.

Idil Akbar

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Menyelesaikan pendidikan master Ilmu Politik di FISIP Universitas

Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: idil.akbar@gmail.com

Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2007 menyelesaikan program master dari Faculty of Asian Studies Australian National University dan mendapat gelar doktor dari Kyoto University Jepang tahun 2012. Memiliki passion dalam bidang gender dan politik, kepemimpinan perempuan, gender dan desentralisasi, hak-hak asasi perempuan dan anak serta gender, Islam dan demokrasi di Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah diterbitkan dalam jurnal nasional, internasional dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: kurniawati.dewi@yahoo.com.

Lili Romli

Penulis merupakan peneliti senior dan professor riset di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan doctoral ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Kajian yang diminati penulis adalah tentang kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui: email: liliromli.lipi@gmail.com

M. Fajar Shodiq Ramadhan

Penulis merupakan pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, Surabaya. Beberapa karya tulisnya tentang kepemiluan telah dimuat dalam berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email: fajarramadhan@ub.ac.id.

Moch Nurhasim

Adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas

Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza K.D Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Romel Masykuri

Penulis merupakan mahasiswa program magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Dapat dihubungi melalui email: romel.masykuri@gmail.com

Ridho Imawan Hanafi

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Melanjutkan S2 di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Sebelum di LIPI, penulis bekerja sebagai peneliti di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta (2008-2014). Kajian yang diminati adalah demokrasi, partai politik, dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui surel ridhoimawan@gmail.com.

Sri Budi Eko Wardani

Penulis adalah pengajar di departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Pernah menjadi Direktur Eksekutif Puskapol UI. Kajian peminatan penulis adalah tentang kepemiluan, perempuan dan perwakilan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: sbe_wardani@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri dan lain- lain*. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

